

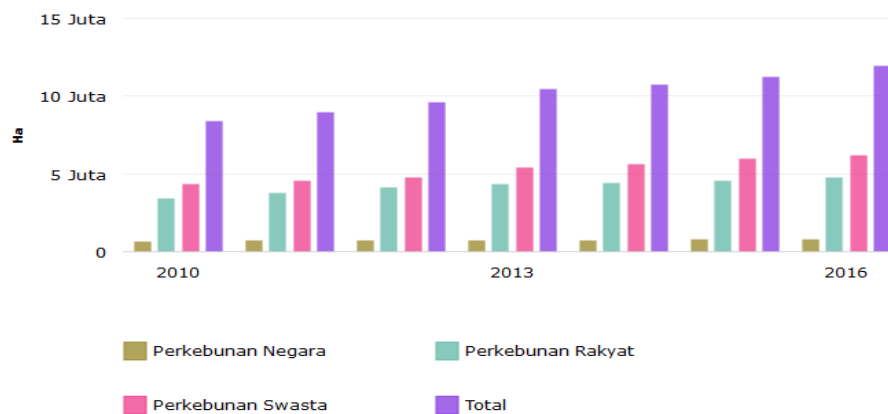
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sejak tahun 1980an, program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) mulai dikembangkan pemerintah. Serangkaian program PIR dan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) menggunakan bantuan modal asing, maka muncul percepatan pembukaan areal-areal baru. Program pembangunan perkebunan melalui pola PIR Trans bertujuan yaitu meningkatkan produksi non migas, meningkatkan pendapatan petani, membantu pengembangan wilayah, serta menunjang pengembangan perkebunan, meningkatkan dan memberdayakan KUD di wilayah plasma. Sejak bulan Februari 2007 apabila terjadi pembangunan kebun kelapa sawit, perusahaan inti wajib untuk membangun kebun masyarakat di sekitarnya dimana areal lahan diperoleh dari 20 persen ijin lokasi perusahaan atau membangun kebun dari lahan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan semakin banyaknya pembukaan lahan kelapa sawit di beberapa wilayah Indonesia maka semakin banyak pula kebun dari masyarakat yang ada di sekitar lahan atau biasa disebut kebun plasma.

Luas lahan perkebunan sawit Indonesia pada 2016 diperkirakan mencapai 11,67 Hektare (Ha). Jumlah ini terdiri dari perkebunan rakyat seluas 4,76 juta Ha, perkebunan swasta 6,15 juta Ha, dan perkebunan negara 756 ribu Ha, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Dalam sepuluh

tahun terakhir luas lahan perkebunan sawit rata-rata meningkat 5,9 persen. Peningkatan lahan sawit tertinggi pada 2011, yakni sebesar 7,24 persen menjadi 8,99 juta hektar. Saat ini pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelapa Sawit masih berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, RUU sawit ini menuai kritikan dari berbagai kalangan karena dianggap hanya mewakili kepentingan korporasi dan tidak mendukung bagi kesejahteraan petani dan buruh. Dalam RUU tersebut beberapa pasal juga dianggap berbenturandengan salah satu peraturan yang sebelumnya.



Gambar 1.1. Luas Lahan Kelapa Sawit Indonesia (2019)

Jumlah total luas kebun plasma perkebunan besar swasta (PBS) kelapa sawit di Kalimantan tengah (Kalteng) yang terbangun hingga saat ini masih sebanyak 175.351 hektare. Jika dikalkulasi dengan jumlah total luasan perkebunan sudah operasional seluas 1.366.538 hektare, maka plasma yang terbangun tersebut berkisar 128% saja. Perkembangan tanaman oleh perkebunan besar yang sudah operasional saat ini untuk plasma seluas 175.351 hektare. Sedangkan kebun inti sudah mencapai 1.191.187 ha sehingga total luas lahan

yang terbangun atau tertanami sebanyak 1.366.538 hektare. Angka tersebut, secara total memang belum mencapai angka 20 persen. Masih banyak perusahaan yang belum beroperasi karena total jumlah perusahaan besar yang memperoleh izin sebanyak 323 unit. Kewajiban plasma tersebut adalah mengikat kepada perusahaan yang sudah beroperasi, dengan ketentuan membangun plasma kepada masyarakat adalah persentasenya dibandingkan dengan luasan yang sudah terbangun, bukan berpatokan pada jumlah luasan yang tertera dalam izin.

Komoditi kelapa sawit merupakan salah satu andalan komoditi pertanian yang pertumbuhannya sangat cepat dan mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian nasional. Sebagai sumber lapangan kerja, sektor kelapa sawit ini pun menyerap tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir. Berdasarkan kepemilikannya perkebunan kelapa sawit terdiri dari Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Milik Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Milik Pemerintah (PTPN). Industri sawit Indonesia berperan penting dalam menghasilkan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, pembangunan daerah, serta berkontribusi besar terhadap GDP.

Perusahaan berskala besar di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) didominasi perkebunan kelapa sawit yang sekarang seluas lebih satu juta hektar (98 persen) dari seluruh areal perkebunan di daerah tersebut, hanya sekitar 2 persen lahan dijadikan perkebunan karet, kopi, kelapa, lada, dan komoditi lainnya. Kalteng merupakan urutan ke-4 Provinsi terluas perkebunannya setelah Riau, Sumatera Utara, dan Jambi. Luas perkebunannya hampir mencapai 1 juta hektare dan sekarang diprediksi sudah diurutan ke-3 perkebunan terluas di Indonesia.

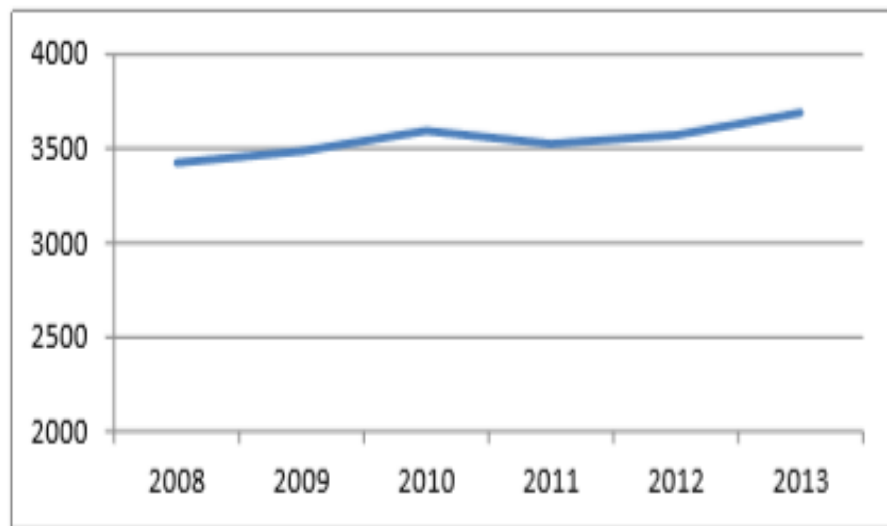
Kabupaten/Kota	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kakao	Jambu Mete	Cengkeh
Kabupaten								
1. Kotawaringin Barat	18 082,5	776,75	192 699,43	164,83	340,6	-	14	-
2. Kotawaringin Timur	47 219,	12 481,24	400 145,01	178,86	5,6	-	-	-
3. K a p u a s	30 955,3	5 391,56	45 868,72	285,56	-	-	-	-
4. Barito Selatan	32 764,52	467,66	3 221,5	76,5	4,1	194,5	1,75	-
5. Barito Utara	46 928,	1 106,5	2 616,	18,2	2	1029,5	1,1	0,5
6. Sukamara	6 119,84	163,11	12 790,35	9,05	52,59	2	5,39	-
7. Lamandau	7 434,	202,5	175 267,46	114,	196,65	9	-	-
8. Seruyan	15 755,	2 057,	321 061,16	104,	25	-	524,5	-
9. Katingan	19 137,11	491,12	76 288,86	15,94	0,04	-	-	-
10. Pulang Pisau	38 342,	5 801,	42 329,	362,	-	-	-	-
11. Gunung Mas	68 223,	438,	41 964,	-	-	-	-	-
12. Barito Timur	59 798,02	618,1	23 774,62	30,7	-	82,66	-	-
13. Murung Raya	51 388,58	262,56	70,62	103,54	24,72	-	-	5
Kota								
14. Palangka Raya	4 786,	191,	1 735,7	-	-	-	2	-
Jumlah	446 932,87	30 448,1	1 339 832,43	1 463,18	651,3	1 317,66	548,74	5,5
2014 ¹⁾	446 943,41	32 340,70	1 297 886,17	1 752,90	921,61	987,16	625,15	5,49
2013 ¹⁾	450 090,01	32 492,49	1 185 592,51	2 051,53	781,83	929,16	795,20	5,35
2012 ¹⁾	455 833,60	73 415,22	1 164 009,41	4 433,55	1 954,57	931,66	1 337,34	24,35
2011 ¹⁾	485 038,24	75 183,47	1 193 483,52	4 434,89	2 367,57	811,97	1 231,44	6,38

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 1.1. Luas Area Perkebunan di Indonesia (2019)

Dari banyaknya komoditas perkebunan yang paling mendominasi di Kalimantan Tengah diurutkan pertama adalah Kelapa Sawit, urutan kedua adalah karet dan urutan ketiga adalah kelapa. Sementara komoditas lainnya yang dibudidayakan petani adalah karet, kelapa, kopi, lada kakao, cengkaeh, jambu mete, dan lain-lain.

Pada dasarnya jumlah perkebunan rakyat di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan besar milik negara yang berarti jumlah produksi dari pelaku usaha perkebunan rakyat lebih besar dibandingkan perusahaan besar negara dan secara otomatis perkebunan rakyat memegang peranan penting dalam industri kelapa sawit di Indonesia. Akan tetapi masih banyaknya keterbatasan pengetahuan dari perkebunan rakyat dibandingkan dengan perkebunan besar swasta menjadikan posisi perkebunan swasta jauh lebih unggul dibandingkan dengan perkebunan rakyat. Kebijakan pengembangan kelapa sawit perlu diarahkan pada pengembangan usaha kelapa sawit rakyat, agar terjadi keseimbangan arus modal yang selama ini banyak dikuasai oleh pihak swasta dan pemerintah. Pola pengembangan perkebunan rakyat khususnya kelapa sawit dilakukan dengan berbagai metode antara lain dengan : (1) Program Inti Plasma yang dikenal dengan Perkebunan Inti Rakyat/PIR, (2) Program Rehabilitasi Tanaman Ekspor/PRPTE, (3) Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Berbantuan, Swadaya Berbantuan dan dengan Swadaya Murni, dan (4) Program Anak Bapak Angkat. Pola inti plasma memiliki berbagai tipe antara lain PIR-Bun dan PIR Trans (Ditjenbun, 1999).



Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan, 2014 (diolah)

Gambar 1.2. Produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Tahun 2008-2013

Dari data diatas terlihat bahwa nilai produktivitas tanaman kelapa sawit selalu mengalami peningkatan. Terjadinya kenaikan atau penurunan produktivitas pada tanaman kelapa sawit tentunya sangat bergantung pada keadaan di lapangan yang berarti terjadi kesalahan dari proses pertanian, baik itu masalah teknis maupun manajemen dalam pengelolaan. Perkebunan kelapa sawit merupakan perkebunan yang cukup potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena, Pertama, kelapa sawit merupakan bahan baku dalam proses produksi minyak goreng sehingga dengan suplai yang berkesinambungan akan menghasilkan harga yang relatif stabil. Kedua, dalam proses pengolahan kelapa sawit dari hulu ke hilir membuka kesempatan kerja yang cukup besar. Ketiga, adanya potensi peningkatan konsumsi minyak dan lemak perkapita. Selama tahun 2005, minyak sawit telah menjadi minyak makan yang terbesar di dunia. Konsumsi minyak sawit dunia mencapai 26 persen dari total konsumsi minyak makan dunia (Suharto, 2006).

Pola kemitraan yang ada saat ini merupakan kelanjutan, peningkatan, perluasan, penataan, dan pemantapan dari kerjasama kemitraan sebelumnya. Sistem kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit diarahkan untuk dapat mengembangkan perkebunan kelapa sawit berorientasi pasar, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan kerja. Sadar dengan nilai ekonomi yang tinggi dari tanaman kelapa sawit, karena sebagai tanaman perkebunan unggulan, apalagi Indonesia agroklimat yang sangat mendukung dari tanaman kelapa sawit ini untuk tumbuh subur, dan dari tahun ketahun jumlah luasan dari tanaman kelapa sawit terus meningkat dan berpeluang akan terus bertambah. Namun, bukan berarti tidak ada hambatan dan tantangan, persoalan hak guna usaha lahan, dari segi hukum dan perundang-undangan serta konflik sosial masyarakat adat harus dihadapi oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit (Nurhakim, 2014).

Lingkungan, kondisi ekonomi dan sosial mampu menciptakan kondisi pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan yang ciri-cirinya dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: (1) ekologis berupa terpeliharanya kualitas lingkungan atau terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan sehingga kualitas hidup petani semakin membaik, (2) ekonomi berupa meningkatnya pendapatan petani untuk memenuhi kebutuhan hidup petani yang mengarah pada tingkat kesejahteraan yang lebih baik, (3) sosial yang meliputi (a) manusiawi dimana gejolak sosial seperti tingkat kriminalitas dan konflik menurun, kinerja lembaga sosial membaik, produktivitas tenaga kerja meningkat dan lain-lain, (b) berkeadilan

dimana semua stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan merasakan manfaat dari keberadaan kebun sawit tersebut, dan (c) bersifat fleksibel.

Secara umum di Indonesia pola kemitraan yang terjadi di semua perusahaan yang bermitra dengan petani sekitar belum mencapai tujuan yang diharapkan. Program kemitraan harapannya dapat meningkatkan kegiatan usaha dan pendapatan ekonomi petani serta memperbaiki tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi perusahaan inti, program kemitraan merupakan suatu peluang pengembangan usaha pada kondisi keterbatasan, pengalaman, lahan dan modal, agar mencapai tujuan yang diinginkan dari program kemitraan. Di Indonesia Perusahaan perkebunan menjadi salah satu sektor utama tatanan ekonomi. Perusahaan perkebunan dalam banyak kasus memiliki posisi dominan dalam pembangunan sosial ekonomi. Sektor perkebunan ini berdampak sangat signifikan dalam arti positif. Dampak positif dengan adanya sektor perkebunan ini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan ekonomi petani plasma dan pembangunan.

Hubungan kemitraan di bidang perkebunan yang dimaksud adalah hubungan kerjasama dengan menganut suatu pola kemitraan dibidang pengembangan usaha perkebunan. Dalam perkembangannya di Indonesia, pemerintah terus melakukan upaya penyempurnaan terhadap pengembangan pola perkebunan kelapa sawit, pola pengembangan perkebunan rakyat dilakukan dengan berbagai metode antara lain dengan Perkebunan Inti Rakyat (PIR), PIR Trans untuk kelapa sawit dan kemitraan inti plasma. Meskipun diyakini

memberikan kontribusi besar dalam pembangunan daerah dan perekonomian nasional, pembangunan agribisnis kelapa sawit harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga menjamin kelestarian lingkungan dan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar, serta mampu menghindarkan tindakan pemutusan hubungan dengan kelompok-kelompok dan lembaga (marginalisasi). Ciri utama penggunaan lahan berkelanjutan adalah berorientasi jangka panjang.

Implementasi pola kemitraan yang dilakukan perusahaan terhadap plasma berlandaskan perjanjian dan kontrak awal pada saat bermitra, untuk itu keduanya harus melakukan perannya masing-masing dengan acuan yang telah diatur pada saat melakukan perjanjian diawal sebelum bermitra. Implementasi pola kemitraan salah satu contohnya adalah pola kemitraan antara perusahaan dengan Plasma. Implementasi pola kemitraan tersebut perlu dikemas dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan baik perusahaan maupun plasma dalam rangka memperkuat perekonomian. Tetapi pada kenyataannya masih saja ada petani yang sudah bermitra mendapatkan pendapatan yang rendah dan akhirnya pola kemitraan tidak tercapai tujuannya. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh petani kelapa sawit yang bermitra yang pertama yaitu soal sistem penentuan harga TBS (Tandan Buah Segar) yang tidak sesuai dengan tujuan bermitra, yang kedua yaitu soal replanting dalam revitalisasi perkebunan program pemerintah indonesia tahun 2006-2010 yang dimana manajemen satu atap dianggap menghambat petani dalam mengelola kebun secara langsung dan juga akad kredit petani kelapa sawit yang sangat tinggi dan menutup

akses petani berhubungan langsung dengan bank, dan program replanting dianggap tidak bisa mengakomodasi kepentingan politik petani untuk mandiri dan berdaulat dengan memberikan kewenangan kepada perusahaan inti untuk mengelola seluruh kebun. Dan masalah terakhir yang dituntut oleh petani mitra yaitu penyelesaian konflik petani yang harus secara transparan (Serikat Petani Kelapa Sawit).

PT BGA merupakan salah satu perkebunan besar swasta di Desa Riam Durian, Kotawaringin Lama, Kalimantan Tengah yang memiliki areal perkebunan plasma kelapa sawit terluas. PT BGA melaksanakan pola kemitraan dengan masyarakat sekitar dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dilakukannya, akan tetapi sistem kemitraan ini tidak diikuti oleh seluruh petani kelapa sawit yang berada disekitar perkebunan milik perusahaan karena beberapa petani masih menganggap dengan bergabungnya petani dengan pola kemitraan maka akan mengurangi pendapatan petani. Tidak semua pola kemitraan menguntungkan kedua belah pihak karena keberhasilan suatu pola kemitraan tergantung pada penerapannya. Soekarno (2009) mengatakan, kunci kemitraan adalah suatu proses yang memerlukan peningkatan intensitas hubungan inti dan plasma berdasarkan kepercayaan satu dengan yang lainnya yang nyata dan terukur. Di dalam kemitraan harus terdapat komitmen yang saling memuaskan kedua pihak dan menumbuhkan saling ketergantungan. Tolak ukur keberhasilan kemitraan dapat dilihat dari kinerja kebun produksi menunjukkan produktivitas kebun naik, harga pokok produksi terkendali, kualitas TBS naik, stabilitas pasokan bahan baku terjamin, adanya kelembagaan petani yang kuat, dan adanya

kelancaran angsuran kredit. Oleh karena itu belum dapat dibuktikan apakah pola kemitraan yang dilakukan oleh PT BGA menguntungkan petani yang bermitra atau justru menyebabkan kerugian yang pada akhirnya hanya satu pihak saja yang diuntungkan.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pola Kemitraan Petani Kelapa Sawit dengan Perusahaan Kelapa Sawit Studi pada PT Bumitama Gunajaya Abadi, Desa Riam Durian, Kotawaringin Lama, Kalimantan Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pola kemitraan perkebunan antara perusahaan dengan petani plasma di PT Bumitama Gunajaya Abadi?
2. Bagaimana manfaat adanya kemitraan perusahaan dengan Masyarakat Wilayah PT Bumitama Gunajaya Abadi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui hak dan kewajiban dalam kemitraan, perusahaan dalam bermitra antara perusahaan dengan petani plasma

2. Mengetahui dan menganalisis manfaat adanya kemitraan perusahaan dengan masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti, menerapkan ilmu pengetahuan serta menambah pengalaman dan menambah wawasan dalam bidang pertanian sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat sarjana pertanian (S1) di Fakultas Pertanian Insititut Pertanian STIPER Yogyakarta.
2. Bagi Petani, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam dunia pertanian khususnya tanaman kelapa sawit
3. Bagi pemerintah dan lembaga terkait dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan pengembangan usaha tani sawit
4. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.